



Biaya Lampu Penerangan Jalan Capai Rp 16M

★ Bebani Keuangan Daerah, Dewan Sebut Perlu Meterisasi

Dinas Pekerjaan Umum akui pembayaran atas tagihan rekening listrik setiap bulannya bisa mencapai Rp 1,4 miliar dimana LPJU diasumsikan hidup selama 24 jam.

SINGARAJA, NusaBali
Biaya operasional Rekening listrik pada lampu penerangan ja-

lan umum (LPJU), ternyata cukup membebani keuangan daerah Kabupaten Buleleng. Setiap tahunnya pembayaran bisa mencapai belasan miliar. Lembaga DPRD pun minta agar segera dilakukan penghematan dengan memasang alat pengatur nyala lampu atau meterisasi karena selama ini penggunaannya tak terukur.

Data yang dihimpun menyebutkan, Pemkab Buleleng melalui Dinas Pekerjaan Umum (DPU) membayar tagihan rekening LPJU rata-rata sebesar Rp 1,4 miliar tiap bulannya. Itu artinya dalam setahun, Pemkab Buleleng mesti menyiapkan alokasi dana di APBD hingga Rp 16,8 miliar. Nah, tagihan rekening LPJU itulah

yang dianggap cukup membebani APBD setiap tahunnya.

Tiga fraksi di DPRD Buleleng, Fraksi PDIP, Hanura dan Nasdem minta agar eksekutif mengambil langkah-langkah penghematan, agar biaya tagihan rekening listrik tersebut tidak lagi membebani APBD. Langkah penghematan itu, bisa juga menjadi salah satu upaya tingkatkan pendapatan asli daerah (PAD). Langkah yang perlu diambil Pemkab dengan memasang timer atau alat pengatur nyala lampu atau meterisasi terhadap seluruh titik LPJU.

"Alternatif lainnya bisa pakai lampu LED, karena memiliki Watt yang kecil tapi tingkat penerangannya tidak kalah dengan

lampu yang ada sekarang. Jadi bisa lebih irit" kata juru bicara gabungan tiga fraksi, PDIP, Hanuara dan Nasdem, Hj Mulyadi Putra, ketika menyampaikan pandangan umum atas RAPBD 2016 kemarin.

Sementara Kadis PU Nyoman Gede Suryawan yang dikonfirmasi, Jumat (13/11) mengakui pembayaran atas tagihan rekening listrik setiap bulannya bisa mencapai Rp 1,4 miliar. Dikatakan, jumlah tagihan rekening LPJU itu berdasarkan perkiraan, dimana LPJU diasumsikan hidup selama 24 jam. "Kalkulasinya itu dihitung hidup sehari penuh," ujarnya.

Suryawan mengaku sangat mendukung usulan dari kalangan

DPRD tersebut. Disebutkan, pemakaian meteran listrik itu akan lebih menguntungkan dan bisa mengurangi beban APBD hingga 40 persen. "Pasti itu, dan kita sudah upayakan tahun ini lima unit, kalau tidak salah satu unitnya seharga Rp 200 juta, kita bertahap penuh itu sesuai dengan kebutuhan," jelasnya.

Suryawan mengungkapkan, pihaknya telah lakukan uji coba dengan penggunaan lampu otomatis (Diming) atas LPJU yang ada di sepanjang ruas Jalan Dewi Sartika. Lampu-lampu tersebut akan menyala ketika suasana gelap. Sehingga pada siang hari, lampu itu akan mati secara otomatis. **k19**



Dalam 7 Tahun, RSUD Buleleng Bobol Rp 753 Juta Karena 847 Pasien Mangkir



Dirut RSUD Buleleng dr Gede Wiartana

SINGARAJA, NusaBali

Selama 7 tahun sejak 2009, tercatat ada 847 pasien yang mangkir dari RSUD Buleleng alias menunggak biaya pengobatan. Total tunggakan mereka mencapai Rp 753 juta. Dari jumlah itu, sebanyak 700 pasien di antaranya mangkir periode 2009-2012 dengan tunggakan mencapai Rp 400 juta.

Adanya pasien mangkir mencapai 847 orang sejak tahun 2009 ini diungkapkan Direktur Utama RSUD Buleleng, dr I Gede Wiartana, saat dikonfirmasi NusaBali di ruang kerjanya di Singaraja, Jumat (13/11). Menurut dr

• NUSABALILIK SURYA ARIANI

Bersambung ke Hal-15 Kolom 1

PASIENT MANGKIR DAN TUNGGAKAN DI RSUD BULELENG

TAHUN	MANGKIR	PIUTANG
2013	26 Pasien	Rp 112 Juta
2014	37 Pasien	Rp 118 Juta
2015	85 Pasien	Rp 123 Juta
TOTAL	147 Pasien	Rp 353 Juta

PASIENT MANGKIR DARI RSUD BULELENG PERIODE SEBELUMNYA

TAHUN	MANGKIR	PIUTANG
2009		
2010		
2011		
2012		
TOTAL	700 Pasien	Rp 400 Juta

Edisi : Sabtu, 14 November 2015

Hal : 1



Sambungan . . .

Karena 847 Pasien Mangkir

SAMBUNGAN DARI HALAMAN 1

Wartana, pihaknya tidak hafal rincian pasien yang mangkir dari RSUD Buleleng selama periode 2009-2012. Namun, dalam 4 tahun itu, jumlah pasien yang mangkir mencapai 700 orang.

Sedangkan selama 3 tahun berikutnya, jumlah pasien yang mangkir dari RSUD Buleleng mencapai 147 orang, dengan tunggakan (menjadi kerugian) sekitar Rp 353 juta. Rinciannya, pasien yang mangkir tahun 2013 sebanyak 26 orang dengan tunggakan mencapai Rp 112 juta, pasien yang mangkir tahun 2014 sebanyak 37 orang dengan tunggakan mencapai Rp 118 juta, dan pasien yang mangkir tahun 2015 sebanyak 85 orang dengan tunggakan mencapai Rp 123 juta.

Menurut dr Wiartana, khusus periode pertama 2009-2012, jumlah pasien yang mangkir 700 orang menimbulkan kerugian sebesar Rp 400 juta bagi RSUD Buleleng. Saat ini, pihak RSUD Buleleng sedang melakukan proses penghapusan piutang setelah 5 tahun

jangka waktu yang diberikan.

"Tahun ini kami sedang proses penghapusan piutang yang sudah lebih dari 5 tahun ditinggalkan oleh pasien yang sempat dirawat di sini (RSUD Buleleng). Saat ini sedang menunggu persetujuan dari Pemkab Buleleng," tandas dr Wiartana.

Meski menimbulkan kerugian bagi RSUD Buleleng, menurut dr Wiartana, jumlah tersebut disebut masih relatif kecil jika dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Dia menyebutkan, kebanyakan pasien yang mangkir dan tidak dapat melunasi biaya perawatan dan pengobatannya di RSUD Buleleng berasal dari kalangan masyarakat kurang mampu.

Menurut dr Wiartana, kondisi pasien mangkir hingga menunggak tersebut masih tetap terjadi hingga tahun 2015 ini. Bahkan, jumlahnya dikawatirkan akan melebihi jumlah pasien yang masuk dalam daftar penghapusan piutang tahun ini. Jumlah tunggakan sebesar Rp 353 juta dari 147 pasien periode 2013-2015 ini tetap akan ditagih pihak rumah

sakit kepada pasien-pasien bersangkutan.

"Caranya dengan mendatangi langsung si pasien ke rumah-rumah mereka," jelas dr Wiartana. Namun, penagihan piutang yang dilakukan oleh tim khusus ini tidak serta merta mengharuskan para pasien nunggak untuk membayar lunas utangnya di RSUD Buleleng.

"Dalam penagihan tunggakan utang nanti, kami masih utamakan azas etika, tidak seperti debt collector. Kalau mereka (pasien nunggak) memang tidak mampu bayar, ya mau bagaimana lagi? Kami hanya menjalankan prosedur yang ada," imbuh dr Wiartana.

Disebutkan dr Wiartana, dalam masa penagihan piu-

tang ini, pihak RSUD Buleleng memberikan rentang waktu selama 3 tahun bagi pasien nunggak untuk pelunasan. Tapi, jika pasien bersangkutan tidak mampu melunasi hingga masa piutang non aktif 5 tahun, maka akan diajukan dalam penghapusan piutang.

Sampai saat ini, kata dr Wiartana, ada beberapa faktor penyebab banyaknya pasien

mangkir. Selain karena memang tidak mampu membayar uang perawatan dan pengobatan lantaran tak punya uang, juga akibat faktor kurang lengkapnya administrasi yang dimiliki masyarakat. Padahal, pemerintah sudah menyiapkan pelayanan kesehatan gratis bagi masyarakat yang kurang mampu, melalui jalur Jaminan Kesehatan Bali Mandara (JKBM).

Ternyata, kata dr Wiartana, banyak di antara pasien yang mangkir dari RSUD Buleleng ini tidak memiliki KK dan KTP. Padahal, KK dan KTP itu sebagai syarat untuk mendapatkan fasilitas JKBM. Karena tak punya KK dan KTP, mereka yang tidak mampu ini harus mengambil jalur umum dan membayar lebih mahal dari jalur JKBM.

"Sangat disayangkan, padahal saat ini pemerintah sudah memberikan kemudahan bagi masyarakat. Tapi, bagaimana mau membantu, kalau persyaratan yang wajib dilengkapi seperti KK dan KTP, terkadang mereka tidak punya?" sesal dr Wiartana. **k23**



Rekanan Dibayangi Penalti dan Black List

Untuk proyek Gedung Puskesmas Abiansemal I, DCK tetap akan memberikan toleransi 50 hari dari jatuh tempo untuk menyelesaikan proyek.

MANGUPURA, NusaBali

Rekanan penggarap proyek milik Pemerintah Kabupaten Badung dihantui banyak tantangan. Selain keterbatasan sumber daya manusia (SDM), pihak rekanan sendiri juga kurang jeli melakukan penawaran pada saat proyek dilelang. Alhasil, ada beberapa proyek yang lambat pengerjannya. Tak jarang juga berakhir pada pemberian denda penalti hingga rekanan masuk dalam daftar hitam alias di-black list.

Ancaman itu juga berlaku

pada rekanan penggarap Gedung Puskesmas Abiansemal I. Kepala Dinas Cipta Karya (DCK) Ni Putu Dessy Darmayanti, menegaskan tak akan tinggal diam bila pembangunan Puskesmas Abiansemal I itu molor pengerjannya. Tapi, untuk proyek dimaksud pihaknya tetap akan memberikan toleransi 50 hari dari jatuh tempo untuk menyelesaikan proyek. Bila juga tidak selesai, maka DCK akan mengambil jalan terakhir.

Untuk denda penaltinya dikenakan sebesar 1/1000 (satu perseribu) dari nilai kontrak Rp 17 miliar. Berarti denda sehari sebesar Rp 17 juta. "Tinggal menghitung berapa hari dia terlambat dikalikan 1/1000 atau Rp 17 juta itu," papar Dessy didamp-



• NUSABALI/YUDA
Kepala DCK Ni Putu Dessy Darmayanti bersama Kabag Humas dan Protokol AA Gede Raka Yuda saat jumpa pers, kemarin.

ingi Kabag Humas dan Protokol Badung AA Gede Raka Yuda, saat memberikan keterangan pers di Kantor Bupati Badung, Jumat (13/11) kemarin.

Bagaimana jika melebihi dari 50 hari? Pejabat asal Denpasar itu menegaskan, pengerjaan ban-

gunan hanya berpeluang molor dalam 50 hari kerja dengan sanksi penalti. "Jika lebih dari itu, rekanan tersebut dipastikan mengalami black list dan tak bisa mengikuti lelang-lelang proyek berikutnya. Saat ini baru ada satu rekanan di Badung yang mengalami black list," tegas Dessy sembari mengingatkan kembali rekanan penggarap gedung

Puskesmas Abiansemal I agar cekatan menyelesaikan tepat waktu, pada 23 Desember 2015.

Tak sekedar black list, imbuhnya, rekanan tersebut juga dipastikan tidak akan bisa melakukan penawaran proyek selama dua tahun. Tidak saja proyek milik Pemkab Badung, tapi juga berlaku di seluruh Indonesia.

Berdasarkan data terakhir,

proyek Puskesmas Abiansemal I, progresnya baru 87 persen. Padahal targetnya 89 persen. "Untuk Gedung Koperasi 97 persen minus 1 persen. Tapi melihat waktu yang tersedia untuk Gedung Koperasi bisa selesai," jelas Dessy. "Yang kami khawatirkan itu adalah Puskesmas Abiansemal I. Kami kasih kesepakatan denda selama 50 hari. Bila tidak selesai baru di black list," tegasnya.

Mengenai masalah tenaga kerja, memang diakui tidak sebanding dengan banyaknya jumlah proyek di Gumi Keris sendiri. Makanya tak jarang para pekerja justru lebih banyak berasal dari luar Bali. Menurut Dessy, inilah persoalan yang akan dihadapi rekanan saat finishing style Bali karena cukup kesulitan mencari tukang yang sesuai. "Pada bagian inilah yang justru membutuhkan waktu lama," ucapnya. "Para pekerja banyak dari luar Bali, ada yang dari Bali memang cuma untuk bagian-bagian tertentu. Ini yang menyebabkan pekerjaan jadi lama," imbuhnya. **asa**



Tarik Ulur R-APBD 2016 Berlanjut

Bisa saja pembahasan R-APBD tercepat di DPRD akan terpecahkan tahun 2015 ini. Sebab bila melihat jadwal pembahasan kali ini diperkirakan hanya tersisa waktu lima hari.

AMLAPURA, NusaBali

Dibayangi deadline waktu hingga akhir November ini pembahasan dan pengerjaan R-APBD

2016 Karangasem, terus dikebut. Rencananya Bappeda Karangasem menyetorkan draf tersebut Jumat (20/11). Selanjutnya pembahasannya, berlanjut hingga berakhir Senin (30/11). Padahal DAU (Dana Alokasi Umum) dan DAK (Dana Alokasi Khusus) secara resmi belum masuk, sesuai Peraturan Presiden (Perpres) tahun 2015.

Agenda sebelumnya draf R-APBD 2016, setor ke DPRD, Kamis (12/11). Kali ini molor, menjadi Jumat (20/11) direncanakan berkoordinasi menyetorkan secara informal, diperkirakan rapat paripurna penyerahan draf R-APBD 2016, Senin (23/11). Kepala Bappeda I Ketut Sedana Merta memaparkan hal itu di Amlapura, Jumat (13/11).

Bisa saja kasus pembahasan R-APBD tercepat di DPRD akan

terpecahkan tahun 2015 ini. Sebab pembahasan R-APBD tahun 2015 di tahun 2014, hanya membutuhkan seminggu hari kerja, kali ini diperkirakan membutuhkan waktu lima hari, 24-27 November, dan 30 November. Sebab, sesuai ketentuan, R-APBD 2016 mesti tuntas pembahasannya 30 November sesuai Permendagri No 52 tahun 2015.

"Saya nanti setorkan draf R-APBD 2016, Jumat (20/11), saya tidak tahu jadwal pembahasan lebih lanjut," kata Sedana Merta.

Di samping itu, kata Sedana Merta walau DAU dan DAK belum sah turun sesuai Perpres, tetap memasukkan DAU dan DAK 2016 itu sesuai informasi yang telah didapatkannya dari pusat. Tinggal menunggu Perpres DAU dan DAK, yang nominalnya telah diterima

informasinya.

DAU tersebut katanya nominalnya Rp 633,24 miliar dan DAK Rp 69,84 miliar. Sehingga R-APBD 2016 menjadi Rp 1,359 triliun, mengalami kenaikan di bandingkan APBD 2015 Rp 1,269 triliun, kenaikannya Rp 89,725 miliar.

Dalam R-APBD kata Sedana Merta juga telah mencantumkan alokasi bayar utang Rp 24 miliar, sedangkan target PAD (Pendapatan Asli Daerah) Rp 213,609 miliar.

Di bagian lain Sekwan DPRD Karangasem I Wayan Ardika mengatakan, walau draf R-APBD 2016 nantinya disetorkan ke meja pimpinan Jumat (20/11), masih menunggu Rapat Bamus untuk menyusun jadwal pembahasan R-APBD itu. "Bisa saja pembahasan R-APBD 2016 kurang dari seminggu. Saya rasa tidak masalah,

terpenting kan telah melalui pembahasan KUA dan PPAS (Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara)," katanya.

Sebab dalam pembahasan R-APBD 2016 nanti hanyalah penjabarannya. Disinggung, banyak item usulan dalam penjabaran itu tidak masuk dalam pembahasan karena kekurangan waktu, Ardika mengatakan, semuanya melalui pembahasan.

Sebab, kata Ardika, semua SKPD telah mendapatkan alokasi dana, terpenting dari total alokasi dana tersebut terjabarkan. Sebelumnya Ketua DPRD I Nengah Sumardi mengingatkan, akan melakukan penolakan, jika R-APBD mencantumkan DAU dan DAK tanpa Perpres. Hanya menginginkan DAU dan DAK definitif. **k16**